



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Blitar

LKJIP

TAHUN
2023



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmatNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dapat tersusun dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini merupakan pelaporan kinerja di tahun terakhir RPJMD Kota Blitar 2021 – 2026 dan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar 2021 – 2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dibuat sebagai pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi serta sebagai media peningkatan akuntabilitas instansi yang dapat dipakai sebagai umpan balik dalam peningkatan kinerja maupun bagi pengambil keputusan.

Dengan segala keterbatasan, kami dengan senang hati menerima masukan dan saran yang membangun guna perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar di masa mendatang. Atas tersusunnya LKjIP Tahun 2023 ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas sumbangan pemikiran serta bantuan moril dan materiil.

Demikian, semoga LKjIP Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar ini dapat bermanfaat dan berguna bagi instansi kami dan pihak terkait.

Blitar, 26 Pebruari 2024
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BLITAR



WAHYUDI EKO SURONO, S.Sos,M.M

Pembina Tingkat I
NIP. 197202161996021002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
EXECUTIVE SUMMARY	1
BAB 1 PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi.....	5
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	10
1.4 Dasar Hukum	10
1.5 Aspek Aspek Strategis	13
1.6 Isu – Isu Strategis.....	13
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
2.1 Rencana Strategis.....	15
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	17
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi/ Sasaran.....	19
3.1.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023	20
3.1.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 - 2023	26
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra.....	29
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Nasional	30
3.2 Akuntabilitas Keuangan.....	35
3.2.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan	38
3.2.2 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran.....	40
3.2.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	42
3.3 Prestasi / Penghargaan	43
BAB 4 PENUTUP.....	44
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Langkah Perbaikan.....	45

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2023 merupakan wujud pertanggung jawaban Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar kepada publik. Laporan ini sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Blitar.

Dalam mendukung visi Walikota yakni **“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mengampu misi yang ke lima yakni Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Berbasis Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih berbasis Teknologi Informasi. Serta mendukung tercapaian tujuan RPJMD Kota Blitar meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan public. Sesuai dengan tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dalam penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan, tujuan yang telah ditetapkan dan tertuang dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar adalah **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”** dengan sasaran yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
2. Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum data kependudukan yang akurat.
3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Sebagai gambaran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tahun 2023 dari hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
A	Tujuan 1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM Bidang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	84,50	89,95	106,02
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	96%	98,20%	102,3%
		Rata-rata persentase kepemilikan dokumen catatan sipil	96%	96,81%	100,8%
2.	Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum data kependudukan yang akurat	Persentase Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	58,6%	62%	106%
B.	Tujuan 2: Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,85 (A)	86,81	101
3.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,85 (A)	86,81	101%
Rata - rata capaian IKU					102,5%

Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. **6.641.057.432,-** (enam milyar Enam ratus empat puluh satu ribu lima puluh tujuh ribu Empat ratus tiga puluh dua rupiah) yang dialokasikan untuk 4 program .

Adapun realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Pendaftaran Penduduk	404.216.224	394.696.300	97,371%
2.	Program Pencatatan Sipil	258.724.222	237.597.450	91.83%

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	751.082.043	747.245.375	99,49%
4.	Program Pengeloaan Profil Kependudukan	45.512.000	45.500.000	99,97%
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.181.522.943	5.027.527.058	97,03%
TOTAL		6.641.057.432	6.452.566.183	97,16%

Berdasar hasil kinerja beserta realisasi anggaran maka dapat dilihat tingkat efisinsi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja utama yaitu:

No	Tujuan / Sasaran / Kinerja Utama / Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	102,3%	97,71%	1,04
		Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	100,8%	91,83%	1,09
2.	Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	106%	99,51%	1,06
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	101%	97%	1,04

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka terbentuklah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dituntut untuk berbuat dan berkarya pada tatanan yang lebih baik, utamanya dalam pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, dimana masyarakat menghendaki agar setiap pelaksanaan Pemerintahan Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat dilandasi dengan prinsip – prinsip keterbukaan dan demokratis.

Untuk menjalankan kemajuan, keseimbangan dan kesinambungan khususnya pelayanan pada masyarakat dibidang kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah diperlukan suatu kerja keras secara menyeluruh sesuai dengan program yang telah ditetapkan yaitu pelayanan pada masyarakat yang cepat, cermat, tepat dan aman.

Selanjutnya sesuai Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas Pokok, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mempunyai tugas pelayanan utama yakni:

1. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.
2. Pengelolaan data kependudukan.
3. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.
4. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian.
5. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan.
6. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian.

7. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
8. Pencatatan Kutipan Akta Perubahan Nama
9. Penyelesaian terhadap pelaporan kelahiran, kematian, perkawinan / perceraian yang terlambat pelaporannya.

Sebagai implementasi dari pencapaian tugas pelayanan utama diatas, maka telah ditetapkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 dengan maksud untuk menentukan arah yang rasional dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran, menentukan kebijakan dan program serta kegiatan secara lebih jelas dan konkrit disertai standart pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sebagai instansi Pemerintah berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Serta berdasarkan Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dalam satu tahun Anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas Pokok, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar.

Kedudukan :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar adalah Unsur Pelaksana otonomi daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi :

Untuk menjalankan tugas dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mempunyai fungsi:

- (1) perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- (2) pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (4) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (5) penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
- (6) pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;

- (7) pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- (8) penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- (9) penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan kewenangan Daerah;
- (10) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (11) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- (12) pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- (13) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (14) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- (15) pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- (16) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi terdiri dari :

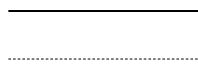
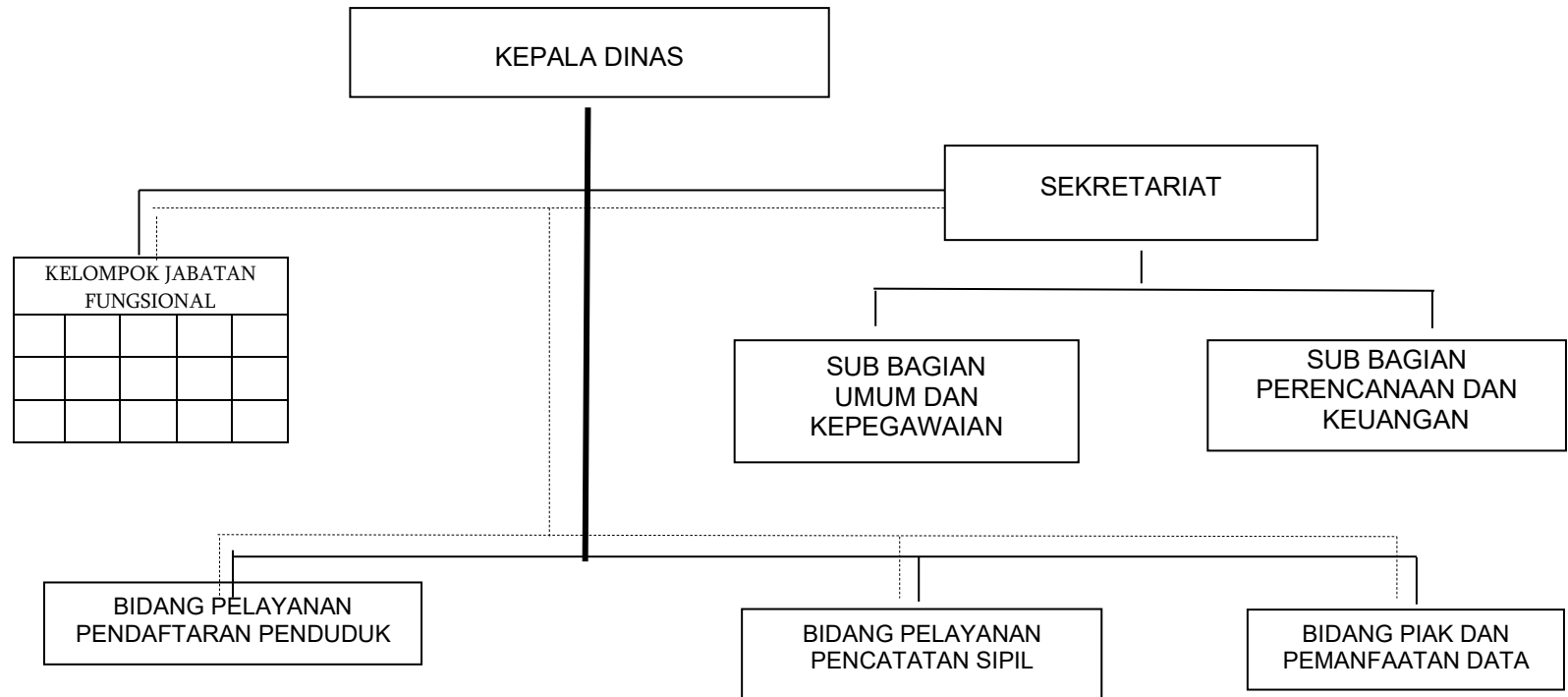
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi :
 - Subag. Perencanaan dan Keuangan
 - Subag. Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
- f. Kelompok jabatan fungsional

2. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 49 Tahun 2016 dapat kami gambarkan sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



- : Garis Komando
- : Garis Koordinasi

1.3 Maksud Dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu Tahun 2023 dengan tujuan :

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.4 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tahun 2023 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
 13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2023;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang

Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

1.5 Aspek Aspek Strategis

Aspek aspek strategis yang mendukung dalam pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan adalah:

1. Adanya Kebijakan terkait pelayanan adminduk daring yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Yang mana hal ini mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk berupaya mengembangkan inovasi pelayanan adminduk. Dengan tujuan dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat dengan berbasis informasi teknologi sehingga dapat mewujudkan pelayanan adminiduk yang membahagiakan kepada masyarakat.
2. Adanya Program Satu Data untuk Semua Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, data kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dijadikan sumber utama data kependudukan dan menjadi rujukan semua intansi pemerintah, swasta maupun masyarakat di wilayah Kota Blitar
3. Sinergitas pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang prima kepada masyarakat kota Blitar.

1.6 Isu – Isu Strategis

Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, masalah yang ada dalam upaya memberikan pelayanan yang membahagiakan kepada masyarakat adalah masih perlunya

peningkatan kualitas pelayanan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Berbagai upaya dalam menghadapi Isu-isu strategis yang berkembang terkait pelayanan administrasi kependudukan telah dilakukan diantaranya :

- a. Menyelarskan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan kementiran/propinsi dan (RPJMD/RKPD)
- b. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan administrasi kependudukan sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan.
- d. Mengoptimalkan sosialisasi dan pelaksanaan identitas kependudukan digital.
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga/OPD dalam pelayanan public

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana yang tujuannya yaitu untuk mengetahui potensi yang dapat mendukung penyelenggaraan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar serta untuk mengetahui permasalahan dan upaya pemecahannya dalam penyelenggaraan tugas selama Tahun Anggaran 2021 - 2026.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah : **“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”** “.

Adapun Misi Kota Blitar tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
3. Mewujudkan Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital
4. Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Kota Blitar tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengampu misi yang ke lima yakni Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah Meningkatnya kualitas pelayanan public, dengan sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
 - 2) Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum
 - 3) Meningkatnya kinerja perangkat daerah
- yang kemudian ditetapkan sebagai kinerja utama pada tahun 2023

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kota Blitar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2023 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia serta piranti lunak lainnya untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan rencana program kerja tahunan OPD dengan menetapkan Program Kerja yang akan dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam mengoperasionalkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mempedomani Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk Tahun 2021 – 2026. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2026 dengan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. Adapun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 secara terperinci sebagaimana dalam “ **Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021 – 2026**”.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar melalui kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun 2023. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar di tahun 2023 berdasarkan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Blitar 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	96 %
		Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	96 %
2.	Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	58,6%
3.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,85 (A)

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi/ Sasaran

Dalam implementasi Sistem AKIP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2022, realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja tahun 2021, target akhir Renstra 2021 – 2026 serta target nasional. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

Tabel 3.1
Atribut Capaian Indikator Kinerja

NO.	NILAI CAPAIAN KINERJA		ATRIBUT
	%	KETERANGAN PERSENTASE	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun
Anggaran 2023

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KET
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	96%	98,20%	102,3%	Sangat Berhasil
		Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	96%	96,81%	100,8%	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	58,6%	62%	106%	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,85 (A)	86,81	101%	Sangat Berhasil

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. **Kinerja Utama 1** : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil dengan 2 indikator yakni rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk dan Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

- Realisasi Indikator kinerja pertama rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk **98,20%** dari target kinerja tahun 2023 sebesar **96%**. Perhitungan ini diperoleh dari :
 - a) Jumlah penduduk wajib KTP yang sudah memiliki dokumen kependudukan KTP sebanyak 119.680 dibagi jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 120.127 dikalikan 100% tercapai 99,63%.
 - b) Capaian KIA 94,97% diperoleh dari Jumlah anak yang sudah memiliki KIA sebanyak 36.880 dibagi jumlah anak usia 0-16 tahun sebanyak 38.834 dikali 100 % tercapai 94,97%
 - c) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) tercapai 100% diperoleh dari jumlah KK yang diterbitkan sebanyak 13.375 dibagi jumlah pengajuan penerbitan KK sebanyak 12.106 dikali 100%

Total capaian dari jumlah 3 layanan tersebut diatas **294,60%** dirata-rata dengan realisasi akhir yakni **98,20%** dari target 96%, dengan nilai tingkat capaian kinerja sebesar **102,3%** dengan predikat **SANGAT BERHASIL** .

- Realisasi Indikator kinerja kedua rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil 96,81 % dari target kinerja tahun 2023 sebesar 96%. Perhitungan ini diperoleh dari :
 - a) Capaian kepemilikan dokumen Akta Kelahiran 99,42,91%

diperoleh dari jumlah wajib akta 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran sebanyak 41,913 dibagi jumlah wajib akta 0-18 tahun sebanyak 41.669 dikalikan 100%

- b) Capaian penerbitan akta kematian 100 % diperoleh dari jumlah akta kematian yang diterbitkan sebanyak 1.446 dibagi jumlah kematian yang dilaporkan / diajukan sebanyak $1.446 \times 100\%$
- c) Capaian kepemilikan Akta Perkawinan 87,84% diperoleh dari jumlah penduduk yang meinkah dan sudah mempunyai akta perkawinan/ buku sebanyak 64,288 dibagi jumlah penduduk yang sudah menikah sebanyak 73.188 dikalikan 100%
- d) Capaian penerbitan Akta Perceraian 100%. Diperoleh dari jumlah akta perceraian yang diterbitkan sebanyak 10 dibagi jumlah pengajuan sebanyak $10 \times 100\%$

Total capaian dari jumlah 4 layanan tersebut diatas **387,26%** dirata-rata dengan realisasi akhir yakni **96,81%** dari target 92% dengan nilai tingkat capaian sebesar **100,8%** dengan predikat **SANGAT BERHASIL.**

Sesuai dengan capaian kinerja pada dasarnya sudah memenuhi target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti dalam pencapaian kinerja utama 1 yaitu :

- a. Masih terdapat penduduk usia 23 tahun ke atas yg belum melakukan perekaman dikarenakan secara faktual penduduk tidak ada ditempat. Adapun langkah yang diambil yaitu:
 - Memberikan undangan/mendatangi secara langsung ke alamat di data untuk mengurus dokumen kepndudukan. Serta penindakan tegas diusia 23 keatas bila penduduk belum melakukan perekaman KTP-el akan diajukan ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kementrian Dalam negeri untuk dibekukan datanya

- Mengoptimalkan kegiatan SIDAK (Verifikasi Data Kependudukan) dengan petugas yang langsung ke rumah penduduk dengan sasaran kepemilikan dokumen KTP-el.
- b. Masih belum optimalnya capaian kepemilikan akta perkawinan/ buku nikah dikarenakan masih adanya elemen data terutama terkait data nomor dan tanggal status perkawinan yang belum terekam dalam database kependudukan sehingga berpengaruh terhadap data perhitungan capaian kinerja yakni cakupan kepemilikan akte perkawinan. Adapun langkah – langkah yang diambil adalah
 - Masyarakat yang sudah menikah namun nomor akte perkawinan belum tercatat dalam data base kependudukan akan dijadikan sasaran dalam pelaksanaan SIDAK (Verifikasi data administrasi kependudukan) yang dilakukan secara door to door langsung ke sasaran dan dilakukan bertahap setiap tahun.
 - Mengadakan PKS dengan KUA dalam update data perkawinan
 - Bekerjasama dengan Pengadilan agama melalui inovasi LADANG PALA (Layanan Sidang Adminduk Bersama Pengadilan Agama) yaitu memfasilitasi warga Kota Blitar dalam pelaksanaan isbad Nikah guna pengurusan dokumen adminduk.
 - Melaksanakan perkawinan masal melalui inovasi PENAK MAS EDI (Pencatatan Perkawinan Masal Sehari Jadi)

Dalam pencapaian kinerja utama 1 faktor – faktor pendukung yang menunjang keberhasilan adalah:

- a. Optimalisasi informasi/sosialisasi terkait administrasi kependudukan di berbagai media.
- b. Inovasi pelayanan berbasis IT yang memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan

- c. Sinergitas pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota

2. **Kinerja Utama 2:** Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum, dengan indikator persentase jumlah perangkat daerah/Lembaga/ badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan. Untuk Indikator kinerja utama ini dengan target kinerja sebesar 58,6% pada tahun 2023, dan terealisasi sebesar 62%. Perhitungan ini diperoleh dari jumlah OPD yang melakukan PKS terkait pemanfaatan data kependudukan sampai dengan tahun 2023 sebanyak 18 OPD dibagi target jumlah OPD yang melakukan PKS sebanyak 29 OPD dikali 100%

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja utama 2 adalah :

- a. Masih kurangnya pemahaman OPD pengguna data kependudukan untuk melakukan PKS dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan dalam rangka penerapan Standart Keamanan informasi akses data kependudukan serta Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor: 470/15192/Dukcapil Tanggal 29 September 2022 perihal Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, disebutkan bahwa Dalam rangka penerapan standar keamanan informasi pada pemanfaatan data kependudukan, calon lembaga pengguna daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota wajib memiliki Sertifikat ISO/IEC 27001 paling lama 6(enam) bulan sejak ditandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan. Saat ini belum ada OPD baik yang sudah PKS yang akan dilakukan

perpanjangan maupun OPD baru yang akan melakukan PKS terkendala belum mempunyai Sertifikat ISO/IEC 27001. Adapun langkah yang diambil yaitu:

- Telah menganggarkan sosialisasi penyusunan PKS kepada OPD/lembaga/badan hukum yang memanfaatkan data kependudukan untuk layanan pada DPA TA 2024
- Melakukan koordinasi secara intens dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait PKS pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publi

Dalam pencapaian kinerja utama 2, faktor – faktor pendukung yang menunjang keberhasilan adalah:

- a. Ketersediaan dan kelancaran akses/kordinasi data dengan pusat

3. **Kinerja Utama 3:** Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator nilai SAKIP Perangkat dengan nilai 85,85 (A). Hasil dari evaluasi SAKIP perangkat daerah oleh inspektorat diperoleh nilai 86,81 (A) dengan capaian kinerja sebesar 101.

Dari capaian 4 (empat) indikator kinerja utama diatas dapat diambil rata-rata keberhasilan kinerja utama sebesar **101,20%** masuk kategori **SANGAT BERHASIL**.

Sesuai dengan capaian kinerja pada dasarnya sudah melampaui target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa rekomendasi hasil laporan hasil evaluasi implemntasi SAKIP yang dilakaukanoeh Inpektur Daerah 3 yaitu:

- a. Mereview kembali target kinrja yang telah ditetapkan didasarkan pada perhitungan yang logis
- b. Informasi kinerja ya g dituangkan dalam laporan kinerja agar diinternnalisasikan pada pegawai agar untuk menumbuhkan sikap peduli dan komitmen dalam mencapai taraget kinerja yang

diperjanjikan

- c. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja , perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

Adapun langkah yang diambil adalah :

- Telah dilakukan review target kinerja dalam perubahan renstra . Khususnya target kinerja program pencatatan sipil
- Hasil capaian kinerja dinas disampaikan telah ke seluruh pegawai dalam rapat koordinasi relaisasi capaian kinerja dan apel pagi
- Setiap hasil monev yang dilakukan telah teridentifikasi hambatan - hambatan dalam pencapaian kinerja , dan sudah digunakan untuk menentukan stratgei dalam peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam pencapaian kinerja utama 3 faktor – faktor pendukung yang menunjang keberhasilan adalah:

- a. Data kinerja yang dikelola merupakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan yakni data DKB dari kementrian dalam negeri.
- b. Adanya komitmen dari semua jajaran yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.

3.1.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 - 2023

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator	Renstra						Ket.
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
			2022	2022	2022	2023	2023		
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95%	96,88%	102,19%	96%	98,20%	102,3%	
		Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	95%	99,50%	100,52%	96%	96,81%	100,8%	
3	Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	51,70%	51,72%	100,04%	58,6%	62%	106%	
4.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 (A)	86,72	102,02%	85,85 (A)	86,81	101%	

Sumber data dari Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tahun 2023

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2023 dapat dikatakan **Sangat Berhasil** walaupun masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2023 sampai dengan akhir periode Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Renstra

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA (AKUMULASI)	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	99%	98,20	99,19%
	Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	99%	96,81%	97,78%
Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	Persentase Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	79,3%	62%	78,18 %
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,35	86,81	99,38

Sumber data dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 jika dibandingkan dengan target kinerja sampai dengan akhir renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar optimis bisa mencapai target di tahun 2026 sesuai dengan dokumen renstra. Hal ini dapat dilihat bahwa di tahun 2023 capaian kinerja masing – masing indikator sasaran strategis tercapai lebih dari 100%.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target nasional seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Nasional

No	Sasaran Strategis/Kinerja	Indikator	Target Nasional	Realisasi Nasional	Realisasi Daerah	Keterangan
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan	Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	99,4	97,58	99,6	+ (melebihi)
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran	98	98,4	99,42%	+ (melebihi)
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan	Cakupan kepemilikan KIA	56	53,58	99,47%	+ (melebihi)

Sumber data dari Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri 2023

Kinerja Dinas Kependudukan Ddan Pencatatan Sipil Kota Blitar di lihat dari tabel dalam pencapaian target nasional untuk indikator cakupan kepemilikan akta kelahiran dan cakupan kepemilikan KIA, dan penyelesaian perekaman & percetakan KTP-el sudah melampaui target nasional.

Untuk mengetahui kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dibandingkan dengan daerah Kab/Kota yang lain dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Perekam KTP-El Provinsi Jawa Timur
Per 31 Desember 2023

NO	KABUPATEN	PEREKAMAN	
		JUMLAH	%
1	KAB. SAMPANG	707.526	99,75
2	KAB. PAMEKASAN	651.032	98,98
3	KAB. MALANG	2.084.341	98,89
4	KAB. GRESIK	984.250	98,81
5	KOTA BLITAR	120.563	98,67
6	KAB. MADIUN	582.866	98,54
7	KAB. PROBOLINGGO	891.747	98,53
8	KAB. TRENGGALEK	598.941	98,46
9	KAB. BLITAR	978.675	98,45
10	KAB. PASURUAN	1.222.273	98,45
11	KAB. MOJOKERTO	869.280	98,45
12	KAB. SIDOARJO	1.515.023	98,23
13	KAB. BANYUWANGI	1.372.243	98,20
14	KAB. NGAWI	707.878	98,12
15	KAB. BOJONEGORO	1.059.060	98,09
16	KAB. TUBAN	976.286	98,05
17	KOTA PASURUAN	153.978	98,05
18	KOTA BATU	167.407	98,05
19	KAB. PONOROGO	774.179	97,98
20	KOTA SURABAYA	2.231.972	97,98
21	KAB. SITUBONDO	534.555	97,90
22	KOTA KEDIRI	222.371	97,86
23	KAB. KEDIRI	1.281.878	97,84
24	KAB. LUMAJANG	840.990	97,80
25	KAB. MAGETAN	540.084	97,79
26	KAB. JOMBANG	1.031.050	97,73
27	KAB. NGANJUK	876.826	97,70
28	KOTA MALANG	657.829	97,68
29	KAB. JEMBER	1.970.943	97,15
30	KOTA MOJOKERTO	103.935	96,92
31	KAB. TULUNGAGUNG	874.240	96,70
32	KAB. BANGKALAN	747.836	96,24
33	KOTA PROBOLINGGO	175.792	96,19
34	KAB. BONDOWOSO	602.905	96,05
35	KAB. PACITAN	460.896	94,98

NO	KABUPATEN	PEREKAMAN	
		JUMLAH	%
36	KOTA MADIUN	150.158	94,07
37	KAB. LAMONGAN	1.023.006	93,48
38	KAB. SUMENEP	835.199	93,40

Sumber data dari Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023

Dalam tabel diatas dapat dilihat Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk capaian perekaman KTP el pada tahun 2023 dibandingkan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se JawaTimur untuk kategori wilayah kota menduduki peringkat lima turun dari tahun 2022 yakni peringkat pertama. Hal ini dikarenakan Masih terdapat penduduk usia 23 tahun ke atas sejumlah kurang lebih 500 orang yang belum melakukan perekaman dikarenakan secara faktual penduduk tidak ada ditempat.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Cakupan Kartu Identitas Anak Provinsi Jawa Timur
31 Desember 2023

NO	KABUPATEN	KEPEMILIKAN KIA	
		JUMLAH	%
1	KAB. SAMPANG	707.526	99,75
2	KAB. PAMEKASAN	651.032	98,98
3	KAB. MALANG	2.084.341	98,89
4	KAB. GRESIK	984.250	98,81
5	KOTA BLITAR	120.563	98,67
6	KAB. MADIUN	582.866	98,54
7	KAB. PROBOLINGGO	891.747	98,53
8	KAB. TRENGGALEK	598.941	98,46
9	KAB. BLITAR	978.675	98,45
10	KAB. PASURUAN	1.222.273	98,45
11	KAB. MOJOKERTO	869.280	98,45
12	KAB. SIDOARJO	1.515.023	98,23
13	KAB. BANYUWANGI	1.372.243	98,20
14	KAB. NGAWI	707.878	98,12
15	KAB. BOJONEGORO	1.059.060	98,09
16	KAB. TUBAN	976.286	98,05
17	KOTA PASURUAN	153.978	98,05
18	KOTA BATU	167.407	98,05
19	KAB. PONOROGO	774.179	97,98
20	KOTA SURABAYA	2.231.972	97,98
21	KAB. SITUBONDO	534.555	97,90

NO	KABUPATEN	KEPEMILIKAN KIA	
		JUMLAH	%
22	KOTA KEDIRI	222.371	97,86
23	KAB. KEDIRI	1.281.878	97,84
24	KAB. LUMAJANG	840.990	97,80
25	KAB. MAGETAN	540.084	97,79
26	KAB. JOMBANG	1.031.050	97,73
27	KAB. NGANJUK	876.826	97,70
28	KOTA MALANG	657.829	97,68
29	KAB. JEMBER	1.970.943	97,15
30	KOTA MOJOKERTO	103.935	96,92
31	KAB. TULUNGAGUNG	874.240	96,70
32	KAB. BANGKALAN	747.836	96,24
33	KOTA PROBOLINGGO	175.792	96,19
34	KAB. BONDOWOSO	602.905	96,05
35	KAB. PACITAN	460.896	94,98
36	KOTA MADIUN	150.158	94,07
37	KAB. LAMONGAN	1.023.006	93,48
38	KAB. SUMENEP	835.199	93,40

Sumber data dari Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023

Dalam tabel dapat dilihat Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk capaian kepemilikan dokumen KIA pada tahun 2023 dibandingkan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Jawa Timur untuk kategori wilayah kota menduduki peringkat kedua peringkat kelima turun dari tahun 2022 yakni peringkat dua . Untuk itu perlu dilakukan upaya – upaya untuk menaikkan capaian kepemilikan dokumen KIA.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Cakupan Akte Kelahiran
Provinsi Jawa Timur 31 Desember 2023

NO	KABUPATEN	AKTA KELAHIRAN 0-18 TAHUN	
		JUMLAH	%
1	KOTA PASURUAN	62.391	100,00
2	KOTA MOJOKERTO	38.915	99,60
3	KOTA KEDIRI	81.183	99,55
4	KOTA BLITAR	42.487	99,42
5	KOTA MADIUN	48.840	99,26
6	KAB. MAGETAN	156.997	99,24
7	KAB. PONOROGO	208.269	99,18
8	KAB. SUMENEP	276.530	99,11

NO	KABUPATEN	AKTA KELAHIRAN 0-18 TAHUN	
		JUMLAH	%
9	KAB. GRESIK	339.166	99,10
10	KAB. TRENGGALEK	164.519	98,80
11	KOTA SURABAYA	814.870	98,69
12	KAB. PACITAN	125.112	98,67
13	KOTA BATU	57.036	98,65
14	KAB. MOJOKERTO	293.900	98,57
15	KAB. NGAWI	203.677	98,57
16	KOTA MALANG	230.275	98,36
17	KAB. TULUNGAGUNG	258.023	98,29
18	KOTA PROBOLINGGO	68.447	98,29
19	KAB. MADIUN	162.881	97,97
20	KAB. BLITAR	281.878	96,93
21	KAB. BONDOWOSO	185.920	96,91
22	KAB. LAMONGAN	315.904	96,29
23	KAB. LUMAJANG	270.085	96,20
24	KAB. BOJONEGORO	306.775	96,18
25	KAB. SITUBONDO	151.488	96,05
26	KAB. KEDIRI	406.590	95,53
27	KAB. TUBAN	280.074	95,40
28	KAB. JOMBANG	340.191	95,39
29	KAB. PAMEKASAN	229.842	94,98
30	KAB. BANYUWANGI	402.957	94,93
31	KAB. NGANJUK	266.201	94,73
32	KAB. PROBOLINGGO	280.670	92,51
33	KAB. BANGKALAN	281.848	92,17
34	KAB. SIDOARJO	464.288	91,33
35	KAB. JEMBER	589.623	90,72
36	KAB. MALANG	591.623	89,91
37	KAB. PASURUAN	383.346	88,83
38	KAB. SAMPANG	227.526	79,00

Sumber data dari Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023

Dalam tabel diatas dapat dilihat Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk capaian kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2023 dibandingkan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se JawaTimur untuk kategori wilayah kota menduduki peringkat kelima turun dari tahun 2022 yakni peringkat empat .

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Adapun kebijakan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 berpedoman Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 - 2026 yang telah ditetapkan, sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran strategis daerah. Kebijakan keuangan dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja daerah dengan mengutamakan pencapaian program dan kegiatan prioritas melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

Untuk mewujudkan komitmen kinerja Tahun 2023 sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar menganggarkan program/kegiatan dalam APBD 2023. Adapun anggaran tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi	: Rp. 6.092.219.919
2. Belanja Modal	: <u>Rp. 548.837.513</u>
J u m l a h	: Rp. 6.641.057.432

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan dengan alokasi dana selengkapny terinci sebagai berikut :

Tabel 3.8
Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran
1.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.181.522.943
		<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	23.609.770
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.752.033
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.857.737
		<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	3.496.613.248

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.496.613.248
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.273.773
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	39.688.720
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	49.585.053
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	328.648.013
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.814.152
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.349.661
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.935.120
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.405.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.191.608
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.100.000
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.334.072
		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	12.518.400
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	548.837.513
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.241.382
		Pengadaan Mebel	2.580.880
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	511.015.251
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392.063.800
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.673.800
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	248.390.000
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.476.826
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.224.946
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.749.800

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	191.680.000
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	822.080
2	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	404.216.224
		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	389.232.224
		Sub kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	8.989.920
		Sub. Kegiatan Pencatatan , Penatausahaan dan Penerbitan atas Pendaftaran Penduduk	380.242.304
		Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	7.096.000
		Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	7.096.000
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	7.888.000
		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	7.888.000
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	258.724.222
		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	72.704.381
		Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	48.620.381
		Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	24.084.000
		Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	162.125.018
		Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	4.659.000
		Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	70.872.480
		Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	53.080.169
		Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	33.513.369
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	23.894.823
		Sub kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	23.894.823

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran
3.	Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/Lembaga/ Badan Hukum	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	751.082.043
		<i>Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>	166.368.880
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	160.502.942
		Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	5.865.938
		<i>Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	203.807.833
		Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	203.807.833
		<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	273.783.250
		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	150.264.454
		Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	123.518.796
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	107.122.080
		Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	54.567.346
		Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	52.554.734
		PROGRAM PENGELOAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	45.512.000
		<i>Kegiatan penyusunan Profil Kependudukan</i>	45.512.000
		Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	45.512.000

3.2.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Dalam pencapaian sasaram perlu didukung dengan anggaran yang memadai. Untuk mengetahui persentase anggaran pada sasaran strategis atau kinerja utama dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.8
Alokasi Anggaran Per Tujuan/ Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	404.216.224	6,09%
		Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	258.724.222	3,90%
2.	Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	Persentase Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	796.594.043	11,99%
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	5.181.522.943	78 ,02%
TOTAL			6.641.057.432	100%

Sumber data dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri 2023

Tabel 3.8
Alokasi Anggaran Per Program

No	Program	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Pendaftaran Penduduk	- Persentase peningkatan Kepemilikan e-KTP - Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA - Persentase penerbitan dokumen KK	404.216.224	6,08%
2.	Prograam Pencatatan Sipil	- Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan - Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian - Persentase penerbitan dokumen akta kematian	258.724.222	3,89%

No	Program	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
		- Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran		
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan	751.082.643	11,30%
4.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan standart	45.512.000	0,68%
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan sekretariat	5.181.522.943	78,02%
TOTAL			6.641.057.432	100%

3.2.2 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

Tujuan/Sasaran/Kinerja Utama/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM Bidang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	84	88,72%	106%			
Sasaran 1 : Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	96%	98,20%	102,3%	404.216.224	394.969.300	97,71%
Program 1. Peningkatan Pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP	0,03	0,14	467%			
	Persentase peningkatan penerbitan dokumen KIA	2,55%	3,83%	150%			
	Persentase penerbitan dokumen KK	100%	100%	100%			
	Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	96%	96,81%	100,8%	258.724.222	237.597.450	91,83%
Program 2. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan	2,19%	4,76%	217%			
	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian	2,60%	1,16%	45%			
	Persentase penerbitan dokumen akta kematian	100%	100%	100%			
	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	0,03%	0,51%	1.700%			
Sasaran 2: Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	Persentase Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	58,6%	62%	106%	796.594.043	792.745.375	99,51%
Program 1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan	16%	16%	100%	751.082.043	747.245.375	99,49%
Program 2. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan standar	100%	100%	100%	45.512.000	45.500.000	99,97%
Tujuan 1 : Meningkatnya Tata Kelola Perannkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,85 (A)	86,81 (A)	101%			
Sasaran 3 : Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,85 (A)	86,81(A)	101%	5.181.522.943	5.027.527.058	97%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan sekretariat	86	86,5	101%	5.181.522.943	5.027.527.058	97%
Rata - rata capaian kinerja utama dan capaian realisasi anggaran sasaran strategis				102,5%			97,3%
Rata - rata capaian kinerja program dan anggaran				308%			

3.2.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja diperlukan untuk mengetahui cost per outcome atau anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja apakah kegiatan yang dilakukan dan menggunakan anggaran telah efektif sebagai pengungkit untuk mencapai kinerja. Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan / Sasaran / Kinerja Utama / Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	102,3%	97,71%	1,04
		Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	100,8%	91,83%	1,09
2.	Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	Persentase Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	106%	99,51%	1,06
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	101%	97%	1,04

Sumber data dari Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk 3 kinerja utama :

1. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
 - Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pendafataran penduduk sebesar 1,04 dan dapat dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 102,3% hanya membutuhkan anggaran sebesar 97,71%

- Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil sebesar 1,09 dan dapat dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 100,8% hanya membutuhkan anggaran sebesar 91,83%
- 2. Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum
 - Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,06 dan dapat dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 101% membutuhkan anggaran sebesar 97 %.
- 3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah
 - Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,04 dan dapat dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 101% membutuhkan anggaran sebesar 97%.

Factor pendorong tercapainya efisiensi anggaran dalam pencapaian kinerja

1. Inovasi yang dilaksanakan merupakan Langkah yang sangat strategis dalam peningkatan capaian dokumen administrasi kependudukan
2. Sinergitas antar bidang dalam pelaksanaan program dan kegiatan

3.3 Prestasi / Penghargaan

Prestasi yang didapatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dalam melaksanakan tugas dia tahun 2021 adalah :

1. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 dengan predikat nilai A (memuaskan) terbaik 1 dari 29 OPD
2. Juara Harapan I Liga Inovasi Perangkat Daerah Kota Blitar

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pengukuran kinerja dan evaluasi diatas dapat disimpulkan bahwa Program Penataan Administrasi Kependudukan yang menjadi urusan wajib bidang kependudukan capaian kinerjanya sebesar **102,5%** dengan predikat **SANGAT BERHASIL** Nilai tersebut berasal dari indikator kinerja utama dalam setiap sasaran/kinerja utama pada tahun 2023 dengan perincian sebagai berikut :

1. **Kinerja Utama I** : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil dengan indikator :
 - *Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk , nilai capaian kinerja sebesar **102,3%** masuk kriteria **sangat berhasil***
 - *Rata - rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil, nilai capaian kinerja utama sebesar **100,8%** masuk kategori **sangat berhasil***
2. **Kinerja Utama II** : Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum dengan indikator *Persentase Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan*, nilai capaian kinerja utama sebesar **101 %** masuk kategori **sangat berhasil**
3. **Kinerja Utama III** : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dengan indikator *nilai SAKIP Purnagkat Daerah*, nilai capaian kinerja utama sebesar **101 %** masuk kategori **sangat berhasil**

4.2 Langkah Perbaikan

Untuk capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sudah sangat baik, akan tetapi guna mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar utamanya untuk meningkatkan pelayanan kedepan yang lebih baik lagi sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang membahagiakan , maka hal – hal yang perlu memperoleh perhatian :

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan KTP el dengan: 1. Memberikan undangan/mendatangi secara langsung ke alamat di data untuk mengurus dokumen kependudukan. Serta penindakan tegas diusia 23 keatas bila penduduk belum melakukan perekaman KTP-el akan diajukan ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam negeri untuk dibekukan datanya 2. Mengoptimalkan kegiatan SIDAK (Verifikasi Data Kependudukan) dengan petugas yang langsung ke rumah penduduk dengan sasaran kepemilikan dokumen KTP-el	- Program Pendaftaran Penduduk - Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk - Sub Pencatatan, penatausahaan , dan penerbaitan dokumen atas pendaftaran penduduk - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan - Sub. Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	√		
		Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen perkawinan dan perceraian dengan: 1. Melaksanakan perkawinan masal melalui inovasi PENAK MAS EDI (Pencatatan Perkawinan Masal Sehari Jadi)	- Program Pencatatan Sipil - Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - Sub. Kegiatan Fasilitasi terkait pencatatan sipil - Sub. Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah,	√		

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
		2. Mengadakan PKS dengan KUA dalam update data perkawinan 3. Bekerjasama dengan Pengadilan agama melalui inovasi LADANG PALA (Layanan Sidang Adminduk Bersama Pengadilan Agama) yaitu memfasilitasi warga Kota Blitar dalam pelaksanaan isbad Nikah guna pengurusan dokumen adminduk. 4. Mengoptimalkan kegiatan SIDAK (Verifikasi Data Kependudukan) dengan petugas yang langsung ke rumah penduduk dengan sasaran Masyarakat yang sudah kawin namun nomor akte perkawinan/surat nikah belum tercatat dalam data base	talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan - Sub. Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan - Sub. Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	√		
2	Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	Melakukan sosialisasi penyusunan PKS kepada OPD/lembaga/badan hukum yang memanfaatkan data kependudukan untuk layanan	- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan - Sub. Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	√		

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	- Telah dilakukan review target kinerja dalam perubahan renstra . Khususnya target kinerja program pencatatan sipil - Hasil capaian kinerja dinas disampaikan telah ke seluruh pegawai dalam rapat koordinasi relaisasi capaian kinerja dan apel pagi - Setiap hasil monev yang dilakukan untuk mengidentifikasi dentifikasi hambatan - hambatan dalam pencapaian kinerja , dan sudah digunakan untuk menentukan stratgei dalam peningkatan akuntabilitas kinerja	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah - Sub. Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD	√		

Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi, sehingga dapat diketahui langkah – langkah strategis yang akan dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang .

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR**



WAHYUDI EKO SURONO, S.Sos,M.M

Pembina Tingkat I
NIP. 197202161996021002

MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

TUJUAN										SASARAN										CARA ,MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					KEBUJAKAN	PROGRAM	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM Bidang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dibidang kependudukan dan catatan sipil	83,02 (Baik)	86,66 (Baik)	84 (Baik)	84,50 (Baik)	85 (Baik)	85,50 (Baik)	86 (Baik)	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran kependudukan: $\frac{\sum \text{Prosentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan}}{3 \text{ dokumen}} \times 100$	93,07	96,64	95	96	97	98	99	1. #eningkatan update elemen data penduduk sesuai peristiwa kependudukan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	
										Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil : $\frac{\sum \text{Prosentase Kepemilikan Adminduk dan Capil}}{4 \text{ pelayanan}} \times 100$	93,47	94,13	95	96	97	98	99	2. #eningkatan kesadaran masyarakat terkait kebijakan pelayanan administrasi kependudukan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL		
																			3. #eningkatan pengelolaan arsip pencatatan sipil			
										Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	Persentase jumlah perangkat daerah/ lembaga/ badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	$\frac{\text{Jumlah OPD/Lembaga yang sudah melakukan PKS}}{\text{Jumlah OPD (29)}} \times 100\%$	-	-	51,7	58,6	65,5	72,4	79,3	1. #eningkatan kualitas data kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
2. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83,71 (A)	85,35 (A)	85 (A)	85,85 (A)	86,35 (A)	86,85 (A)	87,35 (A)	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83,71 (A)	85,35 (A)	85 (A)	85,85 (A)	86,35 (A)	86,85 (A)	87,35 (A)	1. #eningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
																			2. #eningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif			

Lampiran 2

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR TAHUN 2023

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Meningkatnya kepemilikandokumen kependudukan dan pencatatan sipil	1. Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	96%	Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP	0,03	Kegiatan Pelayanan Pendafatarn Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTP)	99,62	216.859.250,00
				2. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	2,55		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KIA)	87,35	
				3. Persentase penerbitan dokumen KK	100		Persentase Penerbitan dokumen kependudukan (KK)	100	
						Sub kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 laporan	8.989.920
						Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	32300 dokumen	380.242.304
						Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase ketersediaan blanko dan formulir pendaftaran penduduk	100%	7.096.000,00

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 dokumen	7.096.000,00
						Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase kecamatan / kelurahan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100%	7.888.000,00
						Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataan Penduduk	1 laporan	7.888.000,00
							Jumlah peserta rakor monev pelayanan intern		
	2. Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil	96%	Program Pencatatan Sipil	1. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan	2,19	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akte kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian)		72.704.381,00

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian	2,6		- Akte kelahiran	98,91%	
				3. Persentase penerbitan dokumen akta kematian	100		- Akte kematian	100%	
				4. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	0,03		- Akte perkawinan	83,43%	
							- Akte perceraian	82,19%	
						Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5400 dokumen	48.620.381
						Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 dokumen	24.084.000

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil yang dilaksanakan	100%	162.125.018,00
						Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1 laporan	4.659.000
						Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	1 laporan	70.872.480
						Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 laporan	53.080.169
						Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 laporan	33.513.369
						Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase petugas pelayanan pencatatan sipil yang di bina	100%	47.970.300,00

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Sub kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 laporan	47.970.300,00
2. Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/lembaga/badan hukum	Persentase jumlah Perangkat Daerah/lembaga/badan hukum yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	58,6%	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan	16%	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase PKS pemanfaatana data kependudukan yang diterbitkan	100%	150.583.569
						Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 dokumen	144.717.631
						Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3 dokumen	5.865.938
						Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	100%	214.677.133
						Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang	1 dokumen	214.677.133

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Administrasi Kependudukan	Disusun		
						Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah elemen data penduduk yang di update	100%	268.094.384
						Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 laporan	131.091.018
						Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 laporan	137.003.366
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase operator SIAK yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100%	
						Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 laporan	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 laporan	
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan stamdart	100%	Kegiatan Penyusunan profil kependudukan	Persentase penerbitan buku profil kependudukan dan data kependudukan	100%	45.942.560
						Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil Perkembangan Kependudukan yang diterbitkan	200 buku	45.942.560
3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,85)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan sekretariat	85 (baik)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	23.609.770
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	4.752.033
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	6	18.857.737

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	3.354.919.046,00
						Sub kegiatan nyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang/bulan	3.353.343.546,00
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	96.648.204
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 pakaet	42.888.720
						Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	37 orang	53.759.484
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan standart	100%	265.417.500

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	12.814.152
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	23.349.661
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	13.935.120
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	35.405.000
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	14.971.095
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 dokumen	8.100.000
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	144.324.072
						Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 laporan	12.518.400

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100	84.620.612
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	39.641.600
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	2.580.880
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	42.398.132
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	430.791.600
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	165.591.600
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	265.200.000
						Sub . Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah tenaga harian lepas yang tersedia	6 orang	234.000.000,00
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	297.476.234

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	64.224.354
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainn	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	1	40.749.800
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	191.680.000
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	822.080

Lampiran 3

PENGUKURAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	KET
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	$\frac{\sum \text{Prosentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan}}{3 \text{ dokumen}} \times 100$	96%	98,20%	102,3%	Program Pendaftaran Penduduk	404.216.224	394.969.300	97,71%	
		Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	$\frac{\sum \text{Prosentase Kepemilikan Adminduk dan Capil}}{4 \text{ pelayanan}} \times 100$	96%	96,81%	100,8%	Program Pencatatan Sipil	258.724.222	237.597.450	91,83%	
2	Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	Persentase Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	$\frac{\text{Jumlah OPD/lembaga yang sudah melakukan PKS}}{\text{Jumlah OPD (29)}} \times 100\%$	58,60%	62,00%	106%	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	751.082.043	747.245.375	99,49%	
							Program Pengelolaan Profil Kependudukan	45.512.000	45.500.000	99,97%	
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	85,85	86,81	101,1%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	5.181.522.943	5.027.527.058	97,03%	

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAHYUDI EKO SURONO, S.Sos. M.M**
Jabatan : **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran pekerjaan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Walikota Blitar,
Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 29 Oktober 2023
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Blitar,

WAHYUDI EKO SURONO, S.Sos. M.M
Pembina Tk.I
NIP. 19720216 199602 1002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BLITAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/lembaga/ badan hukum	Persentase jumlah Perangkat Daerah/lembaga/badan hukum yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	58.60()
2	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil	96.00()
		Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	96.00()
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.85(nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	45,512,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	751,082,043.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	258,724,222.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	404,216,224.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,181,522,943.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah
Total:		6,641,057,432.00	



Blitar, 20 Oktober 2023
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Blitar,
WAHYUDI EKO SURONO, S.Sos.M.M
Pembina Tk.1
NIP. 19720216 199602 1002